

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan desa membutuhkan acuan dalam melaksanakan pembiayaan pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan Keuangan Desa pada tahun 2017 masih menggunakan sistem manual hingga masuk pada tahun 2018 dari perjalanan selama satu tahun banyak mengalami permasalahan akibat dari pengelolaan keuangan yang sifatnya manual maka, Pemerintah Pusat mengeluarkan wacana mengubah aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan (SISKEUDES) berbasis online agar memudahkan pemerintah untuk mengawasi anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Desa dengan adanya pengelolaan keuangan berbasis online ini memudahkan jalannya administratif yang begitu panjang sehingga, efektif dan efisien.

Sistem keuangan desa pada awalnya dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan pada bulan Mei tahun 2015. Dengan adanya keberhasilan yang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Sehingga, untuk mengembangkan selanjutnya dalam proses penerapan selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP di Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati *Quality Assurance* (QA) (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015).

Tanggal 13 Juli 2015 aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berada di bawah Deputi Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Jakarta. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pelaporannya tata kelola realisasi keuangan desa yang juga bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan adanya aplikasi online sistem keuangan desa ini memudahkan BPKP untuk mengecek dan melihat dana yang dikelola oleh desa terserap dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan baik dan bermanfaat dengan skala waktu yang panjang.

Pembaharuan dalam pengelolaan tata kelola keuangan desa yang bersih dan transparan ini merupakan suatu amanat yang telah dituliskan dan tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bekerjasama dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menandatangani Nota Kesepahaman 9001627115J dan MOU-16/D4/2015, tanggal 6 November 2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2017).

Berdasarkan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa harus berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas dan juga partisipasi. Dari keempat prinsip tersebut merupakan turunan dari keadaan bagaimana pemerintah dapat mengelola anggaran dengan baik dan mampu terserap menyeluruh demi kesejahteraan dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Maka, ketika

pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada keempat prinsip tersebut hal ini dapat melahirkan sebuah program tata kelola pemerintahan desa yang baik atau *Good Village Governance* dengan berprinsip dasar Akuntabel, Transparan, serta Partisipasi Masyarakat (Saputri, 2019).

Dari keempat prinsip atau asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah dijelaskan (Juardi, 2018) akuntabilitas berisikan kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan. Sehingga, penerapan aplikasi online SISKEUDES dapat meningkatkan kualitas desa yang baik. Menghasilkan pelaporan keuangan yang tertib aturan, tertib anggaran dan menghasilkan laporan keuangan dengan hasil yang baik, relevan dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan kualitas desa yang baik ini selaras dengan hasil dari penelitian (Puspita, Sholihin, Muhammad Rijalus, dan Andrianti, 2019) dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa melahirkan pertanggungjawaban dan hal tersebut merupakan hasil dari respon positif, perubahan ini dapat dilihat dari adanya perbaikan pada pengelolaan keuangan desa yang memenuhi asas-asas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Perundang-undangan khususnya di desa Nogosari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Pencapaian dalam pengelolaan keuangan desa yang baik juga nantinya akan berpengaruh terhadap *Value for money* yang dimana berisi asas efektif, efisien, dan ekonomis atau biasa disebut dengan asas 3E. Menurut (Rahadi, 2019) indikator dalam penilaian pengelolaan keuangan desa ini dapat dilihat dari

adanya *Value for money* yang berisikan ketiga asas tersebut, ketika sudah memenuhi kriteria dari ketiga asas barulah pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan baik dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa. Nantinya dapat menjadi penilaian bagi penelitian ini bagaimana aplikasi SISKEUDES di Desa Sumberejo Kota Batu memenuhi kriteria-kriteria yang sudah dijelaskan oleh penelitian sebelumnya, sehingga sebagai pendukung atau penyempurna dari penelitian sebelumnya yang dimana nantinya akan diselaraskan dengan konsep *Good Village Governance* jika dilihat secara garis besar memiliki keterkaitan dengan konsep yang digunakan dipenelitian selanjutnya.

Konsep *Good Village Governance* bukan hanya berdasar pada efektif, efisien, dan akuntabel akan tetapi, partisipasi masyarakat juga menjadi penentu dalam penilaian apakah sudah sudah memenuhi atau masih dalam tahap menuju pada konsep tersebut. Partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan dari pengelolaan keuangan desa. Faktor itu berpengaruh pada proses perencanaan dan pembangunan desa, keterlibatan masyarakat ini dijelaskan oleh (Dewi, 2019) ketika partisipasi masyarakat memberikan respon yang positif maka dalam perencanaan dan pembangunan secara garis besar mampu mendominasi keberhasilan dan juga terpenuhinya kebutuhan masyarakat, karena semakin banyak yang terlibat langsung maka aspirasi yang tertuang semakin terwakilkan dari kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masyarakat desa.

Ketika unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi seluruh indikator dari penelitian sebelumnya, mengidentifikasi bahwa ada perubahan dan

perkembangan setelah diterapkannya aplikasi SISKEUDES berbasis online ini. Berdasarkan (Wilma, 2019) bahwa perubahan tersebut terdapat pada proses pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban telah terlaksana dengan baik.

Sama halnya dirasakan oleh (Morenly Marchel Welley, Rosalina A.M. Koleangan, 2018) bahwasanya Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES di pada Desa-desa di Kecamatan Sonder, dapat dilihat dari perubahan yang baik pada tata kelola keuangannya, perencanaan pembangunan yang baik. Pengelolaan yang baik ini juga merupakan wujud dari tertib anggaran yang tepat waktu, transparan, dan pelaporan keuangan yang menjadi efektif. Hal ini menjadi hal yang positif bagi pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan dan pengelolaan keuangan pada desa-desa di Kecamatan Sonder.

Maka dari itu, hasil penelitian-penelitian terdahulu ini nantinya digunakan sebagai pendukung, sekaligus pelengkap terhadap permasalahan yang ada di Desa Sumberejo Kota Batu, apakah sesuai dan menemukan solusi yang serupa agar menjadi tinjauan kembali bagi Pemerintah Kecamatan Batu atau Pemerintah Daerah dalam menanggapi masalah tersebut.

Permasalahan itu dikarenakan setiap desa mendapatkan pencairan Dana Desa disesuaikan dengan kondisi geografis, jumlah penduduk, angka kematian di setiap desa. Dapat dilihat dari Tabel 1 ini pembagian Dana Desa yang diberikan dari APBN dari tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pembagian Dana Desa Dari Tahun 2015-2019

Tahun				
2015	2016	2017	2018	2019
20,76	46,98	106,98	106,98	116,98
Triliun,	Triliun	Triliun	Triliun	Triliun

Sumber: (Saputri, 2019)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa anggaran yang dibagikan mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan 60 Triliun dan di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 70 Triliun, data tersebut dikutip dari penelitian (Saputri 2019). Hal ini melatarbelakangi mengapa penguatan dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan desa harus ditingkatkan, seperti halnya dalam pengelolaan keuangan Desa Sumberejo awalnya mengalami keterlambatan dalam penyetoran administrasi untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sehingga, dalam tata kelola keuangan tidak tertib anggaran. Untuk itu pengelolaan anggaran Dana Desa yang begitu besar maka tertib anggaran harus diperhatikan dan menjadi pengawasan ketat bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk mengawasi anggaran desa.

Anggaran yang tidak sedikit tersebut menjadi beban tersendiri bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan dengan baik serta dapat menerapkan seluruh prinsip-prinsip yang tertera di dalam Undang-undang serta regulasi yang

lainnya dalam mengatur tata kelola keuangan desa, demikian menjadikan syarat dalam pertanggungjawaban Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Daerah dan Pusat. Tentunya akuntabilitas dalam pelaporan dan perencanaan menjadi titik terberat Pemerintah Desa dan bukan persoalan yang mudah, karena permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa baik SDM ataupun pengetahuan serta *skill* yang dimiliki untuk menyelenggarakan sistem secara maksimal masih terbilang minim. Latar belakang pendidikan serta kurangnya pengetahuan untuk menguasai *Information Technology* (IT) ini juga yang memicu munculnya permasalahan-permasalahan diatas.

Kekhawatiran dari kendala yang lahir di lingkungan Pemerintahan Desa dengan lemahnya akuntabilitas, transparansi, serta responsivitas, dan partisipasi ini akan menjadi tantangan terbesar bagi Pemerintahan Desa. Potensi penyimpangan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan, dibuktikan dengan beberapa kasus yang menjerat perangkat Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2019 melakukan tindakan korupsi dengan berbagai sumber dana dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, APBDes, Bantuan Gubernur, dan Bantuan Bupati dan lain sebagainya dapat dilihat dari Tabel 2 berikut:

Tabel 1.2

Kasus Korupsi yang Melibatkan Kepala Desa di Propinsi Jawa Timur tahun 2018-2019

No.	Kabupaten	Tersangka	Kasus Korupsi
1	Malang	Kades Druju	ADD th 2015-2017
		Kades Tlogosari	DD th 2017

2	Jombang	Kades Dukuhmojo	DD th 2018
3	Purworejo	Kades Ketangi	ADD, DD,PDRD, Bantuan Gubernur dan Bantuan Bupati th 2015-2017
4	Sidoarjo	Kades Pesawahan	APBDes 2016
5	Tulungagung	Kades Sumberingin	DD dan ADD th 2015- 2016
6	Magetan	Kades Sempol	APBDes th 2014, 2015 dan 2016
7	Mojokerto	Kades Kepuhanyar	DD th 2016
8	Bojonegoro	Kades Jari	APBDes 2014-2016
		Kades Pragelan	DD th 2016

Sumber: Berita Media Cetak/Elektronik, diolah penulis, 2019

Dari data kasus korupsi yang menjerat 10 Kepala Desa di 8 Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2019 ini dilatarbelakangi dengan berbagai masalah. Tindakan korupsi yang dilakukan bukan berdasarkan karena ingin memperkaya diri sendiri melainkan dapat disebabkan oleh administrasi yang tidak lengkap, penyalahan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan, dan juga anggaran yang digunakan di waktu yang salah. Hal ini merupakan tindakan korupsi sehingga, Kepala Desa ataupun

Bendahara Kas Desa harus teliti dan sesuai dengan prosedural yang diatur dalam perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa.

Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana proses serta penerapan dilapangan terhadap aplikasi Sistem Keuangan Desa berbasis online ini sebagai salah satu syarat atau tuntutan dari adanya *Smart City*, pembaharuan dalam menyelesaikan masalah tentunya diberbagai desa memiliki solusi dan cara tersendiri, untuk dijadikan evaluasi bersama dengan Pemerintah agar mendapatkan solusi dan memperbaiki dengan responsif permasalahan yang ada.

Apakah Desa Sumberejo dalam menghadapi hambatan dalam pengelolaan aplikasi menjadi permasalahan yang kompleks, jika berdasarkan dengan penjelasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa fitur yang diberikan sudah didesign semudah mungkin sehingga perangkat Pemerintah Desa tidak mengalami kendala dalam pengoperasiannya. Tentu saja, penjelasan dengan yang ada dilapangan berbeda. Sehingga, peneliti ingin mengetahui penyebab dan apa saja kendala yang ditemui di Desa Sumberejo, mengapa masih saja menghadapi masalah dalam mengoperasikan aplikasi ini.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kota Batu berbasis online ini dilaksanakan pada tahun 2018 dan terus mengalami penyempurnaan di tahun 2019 dan diterapkan secara berasamaan diseluruh desa Kecamatan Batu yang terbagi menjadi empat desa yaitu, Desa Oro-Oro Ombo, Desa Pesanggrahan, Desa Sumberejo dan Desa Sidomulyo. Dari keempat desa tersebut sistem keuangan desa ini secara serentak diterapkan untuk pengelolaan keuangan desa,

agar mendapatkan output berupa pengelolaan keuangan desa yang transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Batu dalam menerapkan Sistem Keuangan Desa berbasis online ini kedepannya diharapkan mampu untuk saling terintegrasi dengan Sistem Keuangan Kota Batu, mampu meningkatkan kompetensi dan integrasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan memberikan pendampingan serta layanan konsultasi yang diberikan oleh dinas terkait yang memiliki wewenang dalam mengurus hal ini. Lingkup layanan tentang pengelolaan keuangan desa, fungsi dan ketentuan sesuai dengan kaidah hukum yang sebagaimana semua telah tersedia didalam fitur Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berbasis online tersebut. Sebagaimana juga yang diketahui oleh masyarakat bahwa Pemerintah Kota Batu menerapkan *Smart City* yang dimana semua situs website dan pelayanan yang ada di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batu berbasis *e-Government* menjadi satu rangkaian, harapannya adalah saling terintegrasi dan mampu mencapai sistem tata kelola pemeritahan yang baik atau *Good Governance*.

Namun, Desa Sumberejo dalam pelaksanaan SISKEUDES dimulai dari sistem manual hingga berubah menjadi online pada satu tahun terakhir masih menemukan masalah mengenai SDM yang kurang kompeten, karena dirasa masih saja terlambat daripada desa-desa yang lainnya dalam pengajuan rekomendasi untuk pencairan dana desa. Padahal jika kita melihat Sistem Keuangan Desa berbasis online ini hadir sebagai jawaban atas permasalahan

keterlambatan dalam proses pengajuan pencairan dana desa dan juga jawaban pemberian kemudahan dalam tata kelola keuangan.

Padahal jika kita tinjau mengenai permasalahan serta munculnya sistem berbasis online ini merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada. Apakah sistem yang diberikan atau yang tersedia di dalam sistem ini masih didesign begitu rumit hingga tidak *friendly* untuk operator desa yang nantinya akan menginput data anggaran desa. Serta, berdasarkan dengan penyampaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa fitur yang tersedia di dalam aplikasi ini adalah sudah didesign dengan sebegitu mudahnya agar dalam pelaksanaan oleh Pemerintah Desa tidak mengalami kendala.

Didasarkan dari pengetahuan SDM yang tersedia di Pemerintah Desa Sumberjo, bisa saja dilihat berdasarkan rekam jejak pendidikan yang dimiliki SDM di Desa Sumberejo, karena beberapa kriteria tersebut sangat mempengaruhi kinerja yang dihasilkan. Maka, diperlukan evaluasi sebagai peninjauan ulang dalam pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berbasis online ini karena dengan umur pelaksanaan yang masih begitu muda. Sehingga, diperlukan banyak evaluasi dimulai regulasi, teknis dilapangan dan juga penunjang untuk mencapai target yang hendak dicapai. Agar pemerintah mengetahui kebutuhan dasar yang diperlukan oleh Pemerintah Desa.

Evaluasi yang dilakukan untuk peninjauan ulang kembali terkait dari permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Sumberejo, dengan harapan dapat mengoptimalkan perencanaan penganggaran APBDes tertib anggaran, tertib administrasi, sehingga, lebih cepat, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan. Menyeleraskan sistem tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan *goals* yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Batu sebagai *smart city* dan menuju itu diperlukan perubahan dari unit terkecil yaitu adalah desa sebagai *Smart Village* atau *Good Village Governance*.

Oleh karena itu, pemerintah harus tanggap dan cepat dalam mendiagnosa isu dan mampu meningkatkan kinerja organisasi. Dengan demikian, dapat membangun sebuah sistem tata kelola keuangan desa yang baik, menjalankan ketentuan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Melihat kebijakan tersebut memiliki konsekuensi oleh Pemerintah Desa untuk menerapkan prinsip profesional, efektif dan efisien, serta transparan dan akuntabel didasarkan pada prinsip-prinsip **Keuangan Publik** yang baik agar terhindar dari resiko terjadinya penyeimpangan dan penyalahgunaan.

Hal ini masih menjadi kendala oleh Desa Sumberejo terhadap tertib anggaran, perlu diadakan evaluasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berbasis online. Terkait dengan apakah sistemnya yang sulit untuk dioperasikan, atau SDM yang kurang. Sehingga, ada tumpang tindih tugas pokok dan fungsi, atau memang karena pengetahuan dari operator yang menjalankan kurang mengetahui dan menguasai aplikasi. Oleh sebab itu, diperlukan tinjauan ulang atau evaluasi terkait aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Sumberejo yang sudah berjalan selama satu tahun belakangan ini.

Harapan dari evaluasi ini menjadikan saran bagi Pemerintah Kota Batu agar segera memperbaiki dan melakukan suatu terobosan atau inovasi operasional guna mewujudkan visi misi dan untuk menjawab permasalahan yang sedang berkembang atau masih *uptodate*. Dengan adanya proyek perubahan ini Pemerintah Desa dan Kecamatan Batu diharapkan mampu menjawab persoalan yang sedang berkembang di masyarakat, sesuai dengan pengelolaan keuangan desa pemerintah dituntut untuk memenuhi prinsip tata kelola keuangan desa yang baik berasaskan Akuntabilitas, Transparansi, Responsivitas dan juga Partisipasi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Online Menuju *Good Village Governance* (Studi Kasus Pada Desa Sumberejo, Kecamatan Batu, Kota Batu)?
2. Apa Saja Faktor Penghambat dari Evaluasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Online Menuju *Good Village Governance* (Studi Kasus Pada Desa Sumberejo, Kecamatan Batu, Kota Batu).

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai jawaban atas rumusan masalah yang ada, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengetahui Evaluasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Online Menuju *Good Village Governance* (Studi Kasus Pada Desa Sumberejo, Kecamatan Batu, Kota Batu)
2. Mengetahui faktor penghambat dalam Evaluasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Online Menuju *Good Village Governance* (Studi Kasus Pada Desa Sumberejo, Kecamatan Batu, Kota Batu)

1.4 Manfaat Penulisan

Penjelasan yang telah dijelaskan dari latar belakang masalah, masalah pokok, dan tujuan penelitian, adapun yang menjadi manfaat dilakukannya penelitian ini terdiri atas dua manfaat yaitu manfaat terhadap kepentingan akademik dan manfaat terhadap kepentingan dunia praktis. Adapun manfaat tersebut adalah:

1.4.1 Manfaat Akademik

Mengetahui kebijakan dari Pemerintah Kecamatan Batu dalam pengelolaan keuangan desa sehingga, menjadi sebuah rujukan atau bentuk keilmuan yang didapatkan dari pengelolaan keuangan terkhusus pada tata kelola keuangan pada daerah maupun desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input bagi Kecamatan Batu Kota Batu guna menentukan kebijakan yang

mengarah pada sistem birokrasi yang efektif dan efisien dengan penerapan aplikasi pada pengelolaan keuangan desa dan menjadi sebuah rujukan dari Pemerintah Kecamatan Batu dan Desa Sumberejo dalam memperbaiki permasalahan dan meningkatkan menjadi bentuk tata kelola keuangan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik.

1.5 Definisi Konseptual

Berdasarkan pada judul yang diangkat “Evaluasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Online Menuju *Good Village Governance* (Studi Kasus pada Desa Sumberejo, Kecamatan Batu, Kota Batu)” dapat diambil dari beberapa konsep yang digunakan untuk dasar atau pedoman dalam menganalisa penelitian yang dilakukan. Konsep yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

1.5.1 Evaluasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Evaluasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah kegiatan yang dilakukan untuk penilaian pada aplikasi SISKEUDES di Desa Sumberejo, Kota Batu, apakah mampu berjalan dengan baik atau masih menemukan permasalahan yang tidak mampu dijawab dalam pelaksanaannya, serta polemik/dinamika apa saja yang sedang terjadi, dan strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Sumberejo dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Penilaian aplikasi SISKEUDES berbasis online yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batu di tahun 2018 ini apakah sudah memenuhi

unsur atau prinsip pada pengelolaan keuangan desa yang bersumber pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri No 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Prinsip-prinsip tersebut antara lain transparansi, akuntabilitas dan juga partisipasi.

Dari hasil evaluasi SISKEUDES di Desa Sumberejo Kota Batu menjadi tolak ukur bagi pemerintah sudah sejauh mana dalam pelaksanaan dilapangan, dan kendala apa saja yang ditemui di lapangan bagi pelaku langsung dalam menjalankan SISKEUDES. Dari laporan hasil evaluasi ini dapat menjadi tinjauan dan juga penilaian aplikasi dilihat dari sudut akademis. Pemeriksaan ini nantinya diharapkan mampu menjadi perhitungan bagi Pemerintah Desa Sumberejo, Pemerintah Kecamatan Batu dan juga Pemerintah Kota Batu agar dalam pelaksanaan dikemudian hari menjadi lebih baik, dan mampu menjawab permasalahan dalam pengoperasian aplikasi SISKEUDES berbasis online yang sudah berjalan selama 1 tahun terakhir.

1.5.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan Pemerintah Desa selaku penanggungjawab dalam mengelola keuangan publik dalam tataran desa, diharuskan memenuhi unsur-unsur kebutuhan masyarakat desa dan juga dialokasikan sebagai pemberdayaan masyarakat. Agar dalam pelaksanaan dan pembangunan berdasarkan asas kebutuhan dasar yang memang diperlukan oleh masyarakat, serta mampu berorientasi pada jangka waktu yang panjang.

Pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan berhasil apabila mampu memenuhi indikator di dalam pengelolaan Keuangan Publik yang diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dimana indikator tersebut adalah Akuntabilitas, Partisipasi, dan Transparansi.

Pengelolaan keuangan desa yang didasarkan pada kesejahteraan masyarakat desa merupakan wujud dari adanya *Clean Governance* dan juga *Good Village Governance* jika dilihat bahwa anggaran yang turun ke desa dengan jumlah yang tidak sedikit menjadikan bahwa Pemerintah Pusat sedang memusatkan pembangunan dan perhatiannya kepada desa. Ini pula yang menjadikan bahwa Pemerintah Desa harus lebih kerja keras dalam mengelola keuangan desa, penyerapan anggaran desa demi kesejahteraan masyarakat desa dan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Sehingga, Pemerintah Desa mampu dengan mandiri dan berprinsip pada sub indikator dari pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana dimulai dari tahap perencanaan, setelah itu pelaksanaan, Penatausahaan oleh bendahara desa, pelaporan, pertanggungjawaban (Akuntabilitas), serta Pengawasan Keuangan Desa.

1.5.3 Aplikasi Online Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP di tahun 2015 ini dan diterapkan oleh seluruh desa yang ada di Indonesia, penerapan aplikasi ini diharapkan mampu membantu menjawab permasalahan atau persoalan

yang ada di tingkat Pemerintahan Desa. Perubahan sistem yang semulanya manual berganti menjadi online tentunya, dilatarbelakangi oleh persoalan dengan ketidakefektifan pengelolaan keuangan desa yang terus mengalami keterlambatan dalam proses pengajuan pencairan dana desa kepada Pemerintah Kecamatan yang berwenang mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana desa tersebut. Sehingga, melahirkan sistem keuangan desa berbasis online.

Aplikasi SISKEUDES berbasis online ini memudahkan integrasi pengumpulan data antar desa yang diinput kemudian pihak kecamatan akan memeriksa dan mensinkronkan dengan perencanaan anggaran ketika sudah cocok maka tugas dari *supervisor* kecamatan akan memposting (mengunci) agar pemerintah desa tidak lagi dapat mengubah nominal anggaran tersebut.

Kemudahan yang dihasilkan dari adanya aplikasi SISKEUDES berbasis online ini juga mengidentifikasi bahwasannya pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dapat terlaksana sesuai dengan prosedur atau aturan yang ada, memudahkan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi. Sehingga, dalam pengelolaan keuangan desa pemerintah dapat memantau atau memperhatikan pemerintah desa dapat tertib anggaran, tertib administrasi dan juga akuntabel.

Pelaksanaan secara teknis aplikasi SISKEUDES berbasis online ini menggunakan metode jaringan VPN secara server data, serta komputer/PC

secara online tersambung dan fitur keamanan data dari jaringan publik sangat baik. Sehingga, siapapun yang bukan *Client VPN* tidak dapat masuk atau terhubung dalam sistem ini. Design yang diberikan juga sangat *friendly* agar Pemerintah Desa tidak mengalami kesulitan untuk mengoperasionalkan.

1.5.4 Prinsip *Good Village Governance*

Pandangan peran desa yang semakin kompleks ditambah dengan tanggungjawab yang diemban semakin besar, keterbukaan ruang Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka, Pemerintah Desa di tuntut untuk mampu menyelesaikan permasalahan kompleks yang tengah terjadi, rumit bahkan multidimensional. Hal itu, bisa dilihat dari peran Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa yang tidak sedikit dimana harus menghasilkan *outcome* atau *benefit* yang diharapkan dan jangkauan keberhasilan jangka panjang.

Eksistensi Pemerintah Desa harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, dinamika yang dihadapi oleh Pemerintah Desa sekarang bukan hanya menjadikan desa menjadi wilayah administrasi yang modern akan tetapi, mampu mengelola keuangan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sudah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.

Dibutuhkan strategi pengelolaan keuangan desa yang cerdas, terarah, terprogram dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan, memiliki *value for*

money, dan berorientasi jangka panjang. Ketika Pemerintah Desa sudah memenuhi unsur-unsur tersebut maka, entitas Pemerintah Desa mengarah pada terciptanya tata kelola Pemerintah Desa yang baik atau *Good Village Governance*.

Sinkronisasi Pemerintah Pusat, Daerah hingga Pemerintah Desa sangat diperlukan agar pemerintah mampu bersama-sama bersinergis dalam pembangunan yang terarah maka, perubahan yang dilakukan harus berada pada tataran terendah terlebih dahulu yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Pemerintah Desa menciptakan perubahan yang lebih baik agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembangunan.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional berasal dari turunan rumusan masalah, menjawab pertanyaan-pertanyaan secara keseluruhan, dengan mengambil indikator sebagai penilaian yang akan dibahas pada pembahasan. Menurut (Masri Singarimbun, 2008) definisi operasional adalah pedoman dalam melaksanakan penelitian sebagai tolak ukur di dalam suatu konsep berupa variabel. Maka, pada penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan variabel terbagi menjadi dua sub pokok yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1.6.1 Evaluasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Online Menuju *Good Village Governance* di Desa Sumberejo Kota Batu

1. Perencanaan dan Penganggaran dalam Evaluasi Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Online Menuju *Good Village Governance* di Desa Sumberejo Kota Batu
2. Implementasi Aplikasi dalam Evaluasi Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Online Menuju *Good Village Governance* di Desa Sumberejo Kota Batu
3. Tranparansi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Evaluasi Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Online Menuju *Good Village Governance* di Desa Sumberejo Kota Batu
4. Akuntabilitas Penggunaan SISKEUDES dalam Evaluasi Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Online Menuju *Good Village Governance* di Desa Sumberejo Kota Batu

1.6.2 Faktor Penghambat dalam Evaluasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Online Menuju *Good Village Governance* di Desa Sumberejo Kota Batu

1. Sumber Daya Pendukung Pengoperasian Aplikasi SISKEUDES dalam Evaluasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam

Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Online Menuju *Good Village Governance* di Desa Sumberejo Kota Batu.

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Sumberejo Yang Kurang Kompeten
- b. Jaringan Internet Yang Kurang Mendukung

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Model penelitian deskriptif ini nantinya untuk membantu menganalisa data dalam penulisan adalah menggunakan kualitatif. Menurut Creswell penerapan metode penelitian kualitatif menganalisa permasalahan-permasalahan yang berangkat dari persoalan sosial dan juga kemanusiaan (Creswell, 2016). Mampu mendeskripsikan masalah secara rinci dari isu yang diangkat, serta mampu menganalisa secara jelas berupa fakta, contoh, dan bukti dengan menampilkan data. Pemantapan kebenaran dengan mempelajari dan memahami kasus atau permasalahan yang sedang terjadi.

Pemantapan masalah dapat diperoleh dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan pengumpulan data dari narasumber yang menjadi obyek penelitian secara spesifik atau terperinci yang menyangkut tentang Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berbasis online di Desa Sumberejo Kota Batu.

Penggunaan studi kasus pada penelitian merupakan salah satu bagian dari paradigma kualitatif. Studi kasus menurut (Creswell, 2016) adalah salah satu strategi dalam metode penelitian menganalisa atau memahami masalah secara induktif yaitu, menganalisa secara jelas, dan dapat menampilkan data sebagai fakta penelitian di lapangan, serta melakukan pemantapan kebenaran berdasarkan fakta yang ditemui dan juga mampu memahami dengan baik permasalahan yang ada. Biasanya studi kasus yang digunakan pada saat penelitian kualitatif adalah menunjukkan lokasi yang lebih spesifik untuk dijadikan tempat penelitian agar dalam menganalisa serta mengolah data lebih mengerucut atau sesuai sasaran.

1.7.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini terbagi menjadi 2 sumber data yakni, data primer, dan data sekunder. Secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut.

1.7.2.1 Primer

Pada penelitian ini diawali dengan sumber data primer yaitu sumber data yang dihasilkan dari wawancara. Karena penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif maka, wawancara yang akan dilakukan berupa pertanyaan-pertanyaan terbuka, diharapkan data ataupun pertanyaan yang akan diberikan oleh narasumber dapat berkembang dan menjawab data-data yang diperlukan di dalam penelitian ini. Informan yang hendak diwawancarai adalah Kepala Desa Sumberejo, Operator Desa Sumberejo (selaku operator SISKEUDES),

Supervisor Kecamatan Batu, serta Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) selaku pihak Kecamatan Batu yang menerima dan mengeluarkan surat rekomendasi dana desa.

1.7.2.2 Sekunder

Sumber data sekunder diperuntukkan untuk melengkapi sekaligus mendukung sumber data primer dari penelitian ini. Sumber data sekunder diperoleh dari instansi yang menjadi obyek penelitian ini yaitu Pemerintah Kecamatan Batu khususnya Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dan Pemerintahan Desa Sumberejo.

Data sekunder dapat diperoleh melalui survei instansi, dari hasil survei ini diharapkan menghasilkan atau mendapatkan dokumentasi terkait dengan penilaian pihak Kecamatan Batu pada Desa Sumberejo terhadap tertib anggaran, dan tertib administrasi, arsip notulen terhadap Monev yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Batu terhadap aplikasi SISKEUDES berbasis online, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah Kota Batu yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta dokumen-dokumen yang dapat mendukung peneliti terkait dengan SISKEUDES. Penunjang atau yang sebagai pedoman dalam penelitian ini adalah E-Book Pengelolaan Keuangan Desa, E-book Konsep *Good Village Governance*, E-Book Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa, dan Buku Metodologi Penelitian.

Bukan hanya itu, dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa data, gambar, grafik peta wilayah yang menjadi obyek penelitian yaitu Kecamatan Batu dan juga Desa Sumberejo tersebut sebagai validitas hasil penelitian.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Langkah selanjutnya dalam metode penelitian adalah menentukan teknik pengumpulan data dari hasil penelitian. Menurut (Creswell, 2016) pengumpulan data adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk membatasi penelitian dalam mencari data agar tetap fokus pada masalah yang sedang diangkat. Dalam hal ini diharapkan dalam pengumpulan data hasil penelitian secara jelas, akurat, dan dapat dipercaya (kredibel).

Pengumpulan berbagai informasi yang ada dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada informan, observasi pada instansi atau lokasi penelitian, serta dokumentasi untuk mencatat dan merekam berbagai informasi yang ada. Pengumpulan dari berbagai data yang ingin diperoleh pada penelitian ini dapat menggunakan strategi sebagai berikut, diantaranya adalah:

a. Observasi

Observasi menurut (Hadi, 2014) menjelaskan bahwa kegiatan dalam pengumpulan data dengan mencatat, melaporkan secara terstruktur atas fenomena yang menjadi obyek penelitian. Dengan membuka segala kemungkinan serta kepekaan peneliti terhadap fenomena sekitar yang sedang terjadi sehingga, menggali sensitifitas analisa peneliti terhadap obyek penelitian.

Observasi dapat digambarkan dengan kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian secara langsung, dengan harapan peneliti mampu memahami dengan baik dari obyek penelitian tersebut. Observasi yang dilakukan ini berdasarkan pada permasalahan evaluasi aplikasi SISKEUDES berbasis online di Desa Sumberejo Kota Batu.

Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, apa saja kendala yang ditemui di lapangan, serta apa saja permasalahan yang belum menemukan solusi/jawabannya. Sehingga, diperlukan tinjauan ulang atau evaluasi kembali dari penerapan sistem keuangan desa berbasis online pada Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Desa Sumberejo.

b. Wawancara

Wawancara mendalam menurut (Hadi, 2014) adalah pengumpulan data dengan menggunakan sesi pertanyaan-jawaban secara terstruktur disesuaikan dengan koridor dari fokus penelitian. Pada penelitian kualitatif strategi pengumpulan data menggunakan wawancara merupakan sumber utama untuk memahami permasalahan yang ada, tentu saja narasumber yang dituju lebih memahami dan paham terhadap konsep atau permasalahan yang sedang diangkat. Narasumber yang diwawancarai tidak hanya satu akan tetapi berbagai narasumber yang memenuhi kriteria penelitian.

Wawancara yang akan dilakukan terpusat kepada Kepala Desa Sumberejo Kota Batu, Operator Desa SISKEUDES Desa Sumberejo, *Supervisor* Kecamatan Batu, dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Batu

selaku Pemerintah Kecamatan Batu. Wawancara yang dilakukan kepada obyek penelitian ini dikarenakan memenuhi kriteria yang paham terhadap pelaksanaan sekaligus yang melakukan Monev penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Sumberejo Kota Batu sekaligus pelaku langsung yang pengoperasikan aplikasi SISKEUDES berbasis online.

c. Dokumentasi

Dokumentasi salah satu strategi pengumpulan data yang melihat serta mencatat baik itu dari dokumen/arsip, dan digunakan sebagai pendukung data dari hasil penelitian secara jelas, akurat, dan dapat dipercaya (kredibel). Karena, jika pengumpulan data yang dilakukan hanya berupa wawancara dan observasi maka, tingkat kevalidan data masih kurang di dalam penulisan karya ilmiah. Sehingga, dibutuhkan pendukung dokumentasi dapat berbentuk laporan, gambar, serta karya ilmiah seseorang yang mengarah pada SISKEUDES di Desa Sumberejo.

1.7.4 Lokasi Penelitian

Lokus yang menjadi penelitian ini adalah Desa Sumberejo Kota Batu yang bertempat di Jalan Indragiri No.30, Sumberejo, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Lokasi penelitian selanjutnya adalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) pada Pemerintah Kecamatan Batu yang bertempat di Jalan Sultan Agung No.5b, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur.

1.7.5 Subyek Penelitian

Sebuah penelitian harus cermat dalam menentukan subyek penelitian agar dalam pengumpulan informasi serta data di lapangan sesuai dengan fokus dari penelitian. Penentuan obyek penelitian ini dilakukan secara sengaja dan mencari informan yang sesuai dengan permasalahan yang dianggap paham dan mengerti mengenai fokus kajian. Menurut (Creswell, 2016) jenis penelitian kualitatif dalam penentuan subyek penelitian menggunakan *Purposeful Sampling* penyeleksian untuk menentukan informan yang akan dijadikan subyek penelitian, agar data yang diperoleh masuk pada substansi pembahasan yang dibutuhkan di dalam penelitian.

Di dalam penelitian ini subyek yang diambil yaitu Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Ibu Any Suharni, S.Sos selaku penanggungjawab dalam kegiatan Monitoring dan evaluasi aplikasi SISKEUDES berbasis online, dan Kepala Desa Sumberejo Kota Batu, Operator Desa Sumberejo selaku pelaku lapangan pengoperasian aplikasi SIKEUDES, dan *Supervisor* Kecamatan selaku pendamping dari pihak Kecamatan Batu kepada operator desa dalam menjalankan aplikasi.

Subyek penelitian ini diharapkan membantu peneliti untuk mendapatkan dalam pengumpulan data, yang dapat diperoleh dalam pengambilan sampel. Pengambilan sampel tersebut melewati dua tahapan yaitu sebelum melakukan pengumpulan data dan setelah dilakukan pengumpulan data. Pengambilan sample menurut (Creswell, 2016) dari kesembilan teknik indikator penilaian dalam pengumpulan sampel maka, penelitian ini menggunakan teknik *Maximal Variation Sampling* maksud

dari teknik ini adalah bagaimana mengembangkan fenomena atau masalah dari sudut pandang berbagai informan. Sehingga, dalam menganalisa membuka segala kemungkinan berdasarkan dari berbagai sudut pandang yang akan melengkapi data penelitian.

Labar belakang menggunakan *Maximal Variation Sampling* adalah melihat bagaimana permasalahan mengenai pengetahuan SDM Operator Desa Sumberejo dalam melaksanakan aplikasi SISKEUDES berbasis online ini terus mendapatkan permasalahan dan hambatan di lapangan, agar tercapainya seluruh target keberhasilan dari adanya aplikasi SISKEUDES.

Oleh karena itu, dibutuhkan seluruh pandangan yang menjadi pelaku langsung dilapangan dalam penerapan SISKEUDES di Desa Sumberejo yang telah dijelaskan dalam penentuan subyek penelitian yaitu Kepala Desa Sumberejo, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dari Pemerintah Kecamatan Batu, dan Operator Desa Sumberejo. Dari beberapa subyek penelitian ini maka peneliti nantinya akan menganalisis dari berbagai sudut pandang sehingga, bukan hanya satu sudut pandang akan tetapi berbagai pandangan untuk melengkapi data dan mempertajam sensitifitas analisis dari penelitian ini.

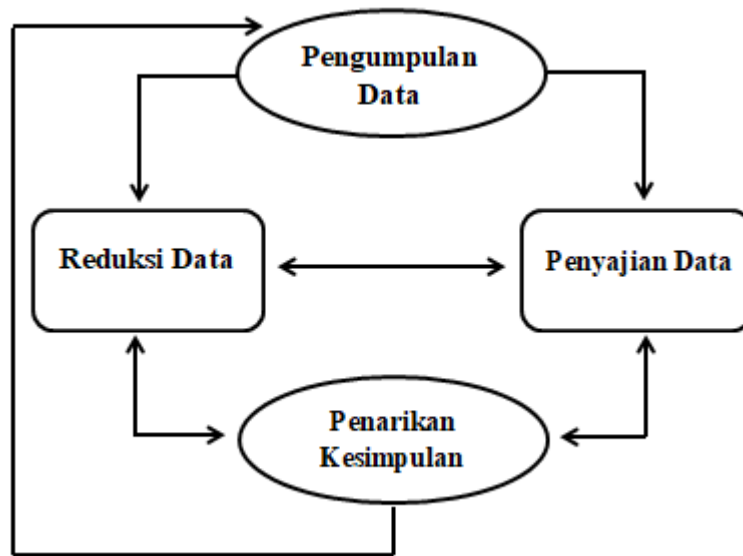
1.7.6 Analisis Data

Analisis data ini dilakukan setelah melakukan penelitian turun lapang, dan pengumpulan data secara langsung. Menurut (Gay, 2006) adalah upaya peneliti kualitatif untuk menyaring data yang didapatkan pada saat

penelitian agar data yang diperoleh dalam pengumpulan data hasil penelitian secara jelas, akurat, dan dapat dipercaya (kredibel). Melengkapi hal itu, menurut (Creswell, 2016) dalam mengumpulkan dan menganalisis data mengolah data dan menyajikan untuk dianalisis. Pada tahap ini bisa diambil dari sumber wawancara terhadap informan, observasi langsung dilapangan mencari dan memahami fenomena yang diangkat tentang SISKEUDES, dokumen mengenai penerapan SISKEUDES, arsip dokumentasi SISKUEDES di Kecamatan Batu dan juga Pemerintahan Desa Sumberejo, dari hasil tersebut selanjutnya adalah memilah dan menyusun data berdasarkan sumber informasi.

Analisis data penelitian menggunakan model interaktif dari (Miles, Huberman, 2014) yang dimaksudkan adalah mencari data dan menggali informasi yang dibutuhkan sampai data yang diperoleh sudah cukup untuk menjawab substansi permasalahan dan rumusan masalah. Pengumpulan data penelitian selanjutnya dilakukan penyajian data sesuai dengan masalah penelitian kemudian dapat ditarik kesimpulan agar pembaca mudah memahami permasalahan.

Model interaktif yang dijelaskan oleh (Miles, Huberman, 2014) digambarkan melalui alur bagan sebagai berikut:



Bagan 1.1 Slot Analisis Data Model Interaktif

Sumber: (Miles, Matthew B dan A Michael Huberman, 1992)

Secara detail dalam analisis data model interaktif akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dilapangan secara langsung, observasi permasalahan, serta dokumentasi kemudian dilakukan reduksi data, dengan maksud data yang didapatkan akan dirangkum dan diringkas sesuai kebutuhan penelitian dan kebutuhan dari substansi yang akan dibahas di dalam analisa penelitian. Pada tahap ini, reduksi data sangat penting karena filterisasi dalam pengambilan data agar tidak lewat dari substansi pembahasan penelitian.

b. Penyajian Data/Display Data

Data yang telah dilakukan penyaringan atau pemilihan data beserta sumber informasi yang didapatkan kemudian penyusunan sajian data dalam bentuk narasi atau mendiskripsikan ulang dari data tersebut. Agar pembaca dapat mudah memahami isi serta intisari dari data yang ditampilkan.

c. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Tahap terakhir dari analisis data menggunakan metode interaktif adalah penarikan kesimpulan yang dimana hasil dari reduksi data kemudian di narasikan kembali (penyajian data) dari hasil laporan. Diharapkan data yang diperoleh dalam pengumpulan data hasil penelitian secara jelas, akurat, dan dapat dipercaya (kredibel). Serta penarikan kesimpulan berisikan jawaban atas rumusan masalah maupun definisi operasional.

